BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/383 /KPTS/IV.02/2022

TENTANG

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;

b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* diperlukan sasaran yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait yang meliputi indikator dan target yang harus dicapai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pencapaian kepada Bupati Lampung Barat melalui sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamppung Barat;
4. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Lampung Barat;
5. Dinas PU-PR Kabupaten Lampung Barat;
6. Dinas Sosial Kabupaten lampung Barat;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
8. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
9. Kepala Bagian hukum sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/383/KPTS/IV.02/2022
TANGGAL : 5 Oktober 2022

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	PIHAK PENDUKUNG
		2022	2023	2024		
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	82%	83%	84%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	54%	56%	58%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	50%	55%	60%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	5. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	86%	88%	90%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait

	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	75%	80%	85%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	85%	85%	85%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Lintas Sektor Terkait
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	65%	67%	70%	Dinas PPKBPPPA	Lintas Sektor Terkait
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	14,5%	15%	15,5%	Dinas PPKBPPPA	Lintas Sektor Terkait
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	80%	85%	90%	Dinas PPKBPPPA	Data diperoleh dari Depag Kecamatan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	85%	85%	85%	Dinas PU-PR	Dinas Kesehatan,
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	85%	85%	85%	Dinas PU-PR	Dinas Kesehatan, PDAM
	6. Cakupan Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan kesehatan Nasional.	15.820	15.820	15.820	Dinas kesehatan	Lintas Sektor Terkait
	7. Cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan.	70%	80%	90%	Dinas PPKBPPPA	Lintas Sektor Terkait
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	15.200	15.200	15.200	Dinas sosial	Lintas Sektor Terkait

	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas	50%	60%	705	Dinas PPKBPPPA	Dinas Kesehatan
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	24.500	24.500	24.500	Dinas sosial	Lintas Sektor Terkait
	11. Persentase desa/ kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open *Defecation Free (ODF).*	100%	100%	100%	Dinas kesehatan	Lintas Sektor Terkait

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Barat

KEGIATAN	**KELUARAN *(OUTPUT)***	**TARGET**			**PENANGGUNG JAWAB**
		2022	**2023**	**2024**	
Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting.*	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS PPKBPPPA
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS PPKBPPPA
	3. Terselenggaranya rembug *stunting* tingkat kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	DINAS PPKBPPPA
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *stunting*	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	DINAS PMP
	5. Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan.	1 Bidan	1 Bidan	1 Bidan	DINAS PMP
	6. Jumlah desa/ kelurahan bebas *Stunting*	0%	0%	0%	DINAS Kesehatan
	7. Persentase Perangkat Daerah yang	100%	5%		BAPPEDA

	meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*				
Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan *Stunting*	136	136	136	DINAS PMP
	2.Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	69 Orang	69 Orang	69 Orang	DINAS SOSIAL
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusia-nya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	90%	90%	90%	DINAS PMP
melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan *Stunting*.	1 Kali	2 Kali	2 Kali	DINAS PPKBPPPA
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	80%	80%	80%	DINAS PUPR
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	100%	100%	100%	DINAS Kesehatan
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	50%	0%	0%	DINAS Kesehatan
Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*.	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	0	0	0	DINAS Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Persentase desa/ kel. yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	100%	100%	100%	DINAS Pendidikan dan Kebudayaan

	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	100%	100%	100%	DINAS Pendidikan dan Kebudayaan
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	0	0	0	DINAS PPKBPPPA
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	40%	60%	70%	DINAS PPKBPPPA
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	40%	60%	70%	DINAS PPKBPPPA
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	40%	60%	70%	DINAS PPKBPPPA
Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*.	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama		1 Kali	1 Kali	KEMENAG
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *Stunting*.	90%	90%	90%	KEMENAG

Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1. Persentase desa /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	100%	100%	100%	DINAS PMP
	2. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *Stunting*.	100%	100%	100%	DINAS PMP
	3. Persentase desa/ kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*.	80%	80%	80%	DINAS PMP
	4. Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	100%	100%	100%	DINAS Kesehatan
	5. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	0%	0%	0%	DINAS Kesehatan
	6. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	0%	0%	0%0	DINAS Kesehatan
	7. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	0	0	0	DINAS Kesehatan
	8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	0	0	0	DINAS Kesehatan
	9. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-- ASI).	0	0	0	DINAS Kesehatan
	10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	0	0	0	DINAS Kesehatan

	11. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	0	0	0	DINAS Kesehatan
	12. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.	0	0	0	DINAS Kesehatan
	13. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.	0	0	0	DINAS PPKBPPPA
melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*	80%	80%	80%	DINAS PPKBPPPA
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	40%	60%	80%	DINAS PPKBPPPA
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	0%	60%	80%	DINAS Kesehatan
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *Stunting*.	2	2	2	DINAS PPKBPPPA
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (*Age Specific fertility rate* /ASFR) (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	0%	0%	0%	DINAS PPKBPPPA
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	40 %	60%	80%	DINAS PPKBPPPA
	7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) pelayanan keluarga berencana.	4%	4%	4%	DINAS PPKBPPPA

Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	25%	25%	25%	DINAS Ketahanan Pangan
	2. Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	0%	0%	0%	DINAS Kesehatan
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohi-drat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	0%	0%	0%	DINAS Sosial
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	0	0	0	DINAS Sosial
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	0	0	0	DINAS Sosial
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan.	0	0	0	DINAS Kesehatan

Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	0%	0%	0%	DINAS KESEHATAN
melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan *Stunting*	1. Persentase Pemerintah Pekon/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting.*	0%	0%	0%	DINAS PMP
	2. Publikasi data *Stunting* di dalam Kabupaten	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS Kesehatan
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*	2 Kali	2 Kali	2 Kali	DINAS PPKBPPPA
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah.	2 Kali	2 Kali	2 Kali	DINAS PPKBPPPA
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan.	2 Kali	2 Kali	2 Kali	DINAS PPKBPPPA
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Desa/Kelurahan.	2 Kali	2 Kali	2 Kali	DINAS PPKBPPPA
	7. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) *Stunting.*	2 Kali	2 Kali	2 Kali	DINAS PPKBPPPA
mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	2 Kali	2 Kali	2 Kali	DINAS PPKBPPPA
	2. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *Stunting*	0%	0%	0%	DINAS Kesehatan

melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	3. Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	0	1 Kerjasama	1 Kerjasama	DINAS PPKBPPPA
mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.	0	0	0	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS